

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### Rekapitulasi Penelitian Sejenis

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Sejenis

No.	Judul Literatur	Penulis	Bahasan
1.	Upaya Korea Women's Assosiation United Dalam Memperjuangkan Kesetaraan Gender di Ranah Politik Korea Selatan	Kumalasari, O. W., & Rosyida, H. N	Jurnal ini membahas ketidaksetaraan gender masih menjadi permasalahan sosial yang sangat penting di berbagai negara di dunia tidak terkecuali Korea Selatan dan di bentuknya sebuah lembaga swadaya masyarakat untuk permasalahan ini yaitu Korea Women's Assosiations United.
2.	Netflix originals dan transnasionalisme SVOD: Analisis Jaringan Semantik di Indonesia dan Korea	Gentur Adiprabawa (2024)	Jurnal ini membahas strategi transnasional Netflix melalui produksi konten orisinal (Netflix Originals) di Indonesia & Korea Selatan dan sebagai strategi advokasi yang dilakukan oleh Korean Women's Assosiations United (KWAU).
3.	The Paradoxical State: The Political Economy of Multidimensional Gender Inequality	Kyuwon Kang, Daniel Connolly, dan Andrew Eungi	Jurnal ini membahas pendekatan negara Korea Selatan dalam mengatasi ketimpangan gender dengan menggabungkan perspetif

	in Korea	Kim (2024)	ekonomi politik feminis dan teori performativitas.
4.	Radical feminist translations and strategies: A South Korean case	Sang-Bin Lee (2023)	Jurnal ini membahas peran penerjemah dalam mengartikulasikan ideologi feminis melalui strategi penerjemahan yang inovatif dan subversif, khususnya dalam karya-karya yang diterbitkan oleh Yeolda Books, sebuah penerbit yang dikenal mendukung feminisme radikal dan trans-exclusionary radical feminism (TERF) dan menyoroti bagaimana feminisme radikal di Korea telah berkembang dengan cara yang unik, meskipun banyak ideologi dan strategi feminis global tetap diterjemahkan dan disesuaikan dengan konteks sosial dan politik lokal.
5	Nationalizing Transnationalism: A Comparative Study of the “Comfort Women” Social Movement in China, Taiwan, and South Korea”	María del Pilar Álvarez (2020)	Jurnal ini membahas bagaimana gerakan sosial yang memperjuangkan keadilan bagi para korban "comfort women" berkembang di tiga negara—China, Taiwan, dan Korea Selatan—dengan fokus pada dinamika antara transnasionalisme dan

			nasionalisme dalam masing-masing konteks politik dan sosial.
6	The Shifthing From The Male Gaze To The Female Gaze In K-pop Girl Groups As The Impact Of #MeToo Movement In South Korea	Natasya Kusumawardani dan Enya Achresia Varianna (2024)	Jurnal ini membahas tentang bagaimana gerakan #MeToo di Korea Selatan memengaruhi perubahan dalam representasi visual dan naratif girl group K-Pop, khususnya dalam hal sudut pandang gender.
7	“Analisis Gender Based Violence dalam Konvensi Cedaw pada Isu Kekerasan Seksual di Korea Selatan	Kardina dan Anisa Marlinda Yurisa (2021)	Penelitian ini membahas bagaimana kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan berbasis gender dianalisis dalam kerangka hukum internasional, khususnya Konvensi CEDAW, serta bagaimana implementasi norma-norma tersebut diterapkan dalam konteks domestik Korea Selatan.
8	“Legislative Pioneers: The Brave South Korean Women Spearheading Change Against Gender Discrimination, Violence, and	Abdul Qayyum Gondal dan Zulkarnan Hatta (2024)	Jurnal ini membahas peran krusial legislator perempuan dalam menginisiasi dan mendorong perubahan hukum yang progresif sebagai upaya melawan diskriminasi gender, kekerasan berbasis gender, dan ketimpangan struktural di

	Inequality Through Progressive Laws”		Korea Selatan.
9	“Gender wars” and populist politics in South Korea”	Kyungja Jung (2024)	Jurnal ini membahas tentang bagaimana konflik gender dimanfaatkan sebagai alat politik oleh politisi populis konservatif, khususnya selama pemilihan presiden Korea Selatan tahun 2022.
10	“The Resurgence and Popularization of Feminism in South Korea: Key Issues and Challenges for Contemporary Feminist Activism”	Jinsook Kim (2021)	Jurnal ini membahas tentang kebangkitan kembali dan popularisasi feminisme di Korea Selatan sejak tahun 2015. Dalam jurnal ini menyoroti bagaimana aktivisme feminis mengalami perluasan dalam hal cakupan, jangkauan, dan agenda, terutama melalui pemanfaatan media digital.

Literatur pertama berjudul “Upaya Korea Women’s Assosiation United Dalam Memperjuangkan Kesetaraan Gender di Ranah Politik Korea Selatan” di tulis oleh Kumalasari, O. W., & Rosyida, H. N. (2022) dalam jurnalnya menjelaskan ketidaksetaraan gender masih menjadi permasalahan sosial yang sangat penting di berbagai negara di dunia tidak terkecuali Korea Selatan. Korea Selatan termasuk salah satu negara modern dan maju dengan perekonomian yang berkembang sangat pesat. Akan tetapi, dibalik itu semua Korea Selatan menyandang predikat salah satu negara dengan kesenjangan gender yang tinggi. Hingga pada tahun 1980-an ketika masa-masa perjuangan demokratisasi Korea Selatan berlangsung dengan

banyaknya aksi demonstran yang dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan pada akhirnya memicu para perempuan untuk ikut turut serta menyuarkan hak-hak perempuan dan menuntut kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan di segala bidang terutama dalam ranah politik melalui berbagai cara seperti demonstrasi di ruang publik serta membentuk berbagai organisasi dan gerakan wanita di Korea Selatan.

Salah satu organisasi untuk perjuang wanita yang terbentuk saat itu ialah Korea Women's Assosiation United (KWAU). KWAU dibentuk pada tanggal 18 Februari 1987 dan berafiliasi dengan 7 cabang serta memayungi 30 women's organization yang tersebar di berbagai kota di Korea Selatan. Tujuan dari dibentuknya KWAU ialah untuk turut memperjuangkan kesetaraan gender di Korea Selatan (KWAU, 2021). Pada awal terbentuknya KWAU, banyak masyarakat yang berpandangan negatif terhadap KWAU, salah satunya ialah KWAU dinilai kurang berhasil dalam menyatukan para aktivis feminisme di Korea Selatan sehingga basis keanggotaan KWAU masih dinilai cukup sempit (Moon, 2002). Selain itu, pada awal mula berdirinya KWAU juga masih sering dipandang sebagai organisasi yang lebih memprioritaskan transisi demokrasi daripada memperjuangkan kesetaraan gender sesuai namanya.

Penulis mengidentifikasi bahwa KWAU menjalankan peran sebagai citizenship champion, solidarity supporter, dan watchdog. Sebagai citizenship champion, KWAU aktif melakukan advokasi melalui petisi dan demonstrasi untuk mendorong pengesahan Undang-Undang Anti-Diskriminasi, yang berhasil mengumpulkan lebih dari 100.000 tanda tangan. Dalam perannya sebagai solidarity supporter, KWAU mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan solidaritas di antara perempuan, seperti penyediaan ruang publik untuk menyuarkan aspirasi dan pengadaan acara yang melibatkan masyarakat luas. Sebagai watchdog, KWAU rutin mengevaluasi dan mengawasi kebijakan partai politik terkait penerapan kuota 30% untuk calon legislatif perempuan, serta mengkritisi partai-partai yang tidak memenuhi komitmen tersebut. Meskipun sistem kuota gender telah diterapkan sejak tahun 2000, implementasinya belum efektif. Pada

pemilu tahun 2020, perempuan hanya menduduki 19% kursi di parlemen Korea Selatan dari total 300 kursi, angka yang masih jauh di bawah rata-rata worldwide sebesar 25,58%. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan gender di ranah politik masih signifikan.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami peran organisasi masyarakat sipil seperti Korean Women's Associations United (KWAU) dalam mendorong kesetaraan gender di politik. Strategi-strategi yang dilakukan Korean Women's Associations United (KWAU) dapat dijadikan referensi dalam merancang program pemberdayaan perempuan dan advokasi kebijakan di konteks lain.

Literatur kedua berjudul "Netflix originals dan transnasionalisme SVOD: Analisis Jaringan Semantik di Indonesia dan Korea" yang ditulis oleh Gentur Adiprabawa (2024) membahas strategi transnasional Netflix melalui produksi konten orisinal (Netflix Originals) di Indonesia dan Korea Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis jaringan semantik terhadap 22 artikel berita di Indonesia dan 45 artikel di Korea Selatan yang diterbitkan antara 2021 hingga 2023. Tujuannya adalah untuk mengungkap bagaimana media di kedua negara membongkar strategi transnasional Netflix dan dampaknya terhadap industri media lokal.

Hasil dari analisis tersebut menunjukkan bahwa Netflix memanfaatkan produksi konten lokal sebagai bagian dari strategi globalnya untuk memperluas jangkauan pasar. Melalui pendekatan analisis jaringan semantik terhadap persepsi publik di Indonesia dan Korea Selatan menunjukkan bahwa Netflix bukan hanya sebagai penyedia hiburan, tetapi juga sebagai agen budaya yang memungkinkan terbentuknya ruang diskursif global. Di Korea Selatan, konten Netflix kerap memuat narasi yang bersentuhan langsung dengan isu-isu sosial seperti ketidaksetaraan gender, peran perempuan dalam masyarakat, serta dinamika kekuasaan dan identitas. Temuan ini relevan dalam membongkar strategi advokasi yang dilakukan oleh Korean Women's Associations United (KWAU). Sebagai organisasi feminis yang aktif sejak era transisi demokrasi di Korea Selatan,

Korean Women's Associations United (KWAU) tidak hanya fokus pada reformasi hukum dan kebijakan terkait hak-hak perempuan, tetapi juga menyadari pentingnya media sebagai sarana amplifikasi wacana. Dalam hal ini, keberadaan platform SVOD seperti Netflix dapat menjadi medium transnasional yang memperluas jangkauan pesan-pesan feminisme, sekaligus membentuk kesadaran publik mengenai isu-isu gender melalui representasi dalam karya fiksi.

Misalnya, serial dan film Korea Selatan yang diproduksi atau didistribusikan melalui Netflix seperti "Kim Ji-young, Born 1982" atau "Nevertheless" memuat kritik sosial terhadap patriarki dan stereotip gender. Representasi ini sejalan dengan agenda Korean Women's Associations United (KWAU) dalam membongkar norma-norma sosial yang menindas perempuan, serta mendorong masyarakat untuk mengadopsi perspektif kesetaraan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, pemanfaatan ruang media transnasional menjadi penting dalam analisis advokasi feminisme di era globalisasi. Media digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai arena perjuangan simbolik yang memperkuat resonansi gerakan feminis, baik di tingkat lokal maupun global.

Studi ini memberikan wawasan penting mengenai dinamika antara platform streaming global dan industri media lokal, serta bagaimana strategi transnasional Netflix mempengaruhi produksi dan distribusi konten di tingkat nasional. Temuan ini relevan untuk memahami tantangan dan peluang yang dihadapi oleh industri media lokal dalam era globalisasi digital.

Literatur ke tiga berjudul "The Paradoxical State: The Political Economy of Multidimensional Gender Inequality in Korea" yang ditulis oleh Kyuwon Kang, Daniel Connolly, dan Andrew Eungi Kim (2024) membahas pendekatan negara dalam mengatasi ketimpangan gender dengan menggabungkan perspektif ekonomi politik feminis dan teori performativitas. Melalui kerangka analisis ini, para penulis menjelaskan

bagaimana negara Korea Selatan tidak hanya berperan dalam menciptakan ketimpangan gender demi kepentingan pembangunan ekonomi dan politik, tetapi juga mengalami keterbatasan dalam menghapusnya karena adanya resistensi sosial yang bersifat struktural dan kultural.

Peran Korean Women's Associations United (KWAU) dapat dilihat sebagai agen konstruktivis yang berupaya meredefinisikan norma dan nilai gender dalam kebijakan publik. Korean Women's Associations United (KWAU) tidak hanya menekan negara untuk mengadopsi kebijakan pro-perempuan, tetapi juga berusaha mengubah makna institusional tentang peran perempuan di masyarakat. Misalnya, dalam upaya mereka mengadvokasi kebijakan kerja ramah keluarga, Korean Women's Associations United (KWAU) menantang norma maskulin dalam dunia kerja yang menempatkan beban kerja dan pengasuhan secara tidak adil kepada perempuan.

Kang dkk. (2024) memaparkan tiga performa gender utama yang memperkuat struktur patriarki di Korea Selatan, yakni: (1) warisan budaya Konfusianisme yang menempatkan perempuan dalam peran domestik; (2) sistem wajib militer yang tidak hanya menegaskan maskulinitas sebagai identitas kewarganegaraan, tetapi juga memperkuat eksklusi perempuan; serta (3) keberlangsungan industri seks yang menunjukkan relasi kompleks antara ekonomi pasar, budaya, dan tubuh perempuan. Ketiga aspek ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender bukan hanya hasil dari kebijakan negara, tetapi juga dipertahankan oleh aktor-aktor sosial dan norma budaya yang sulit diintervensi melalui pendekatan negara semata.

Penelitian ini dapat mendukung argumen bahwa pendekatan top-down negara melalui kebijakan feminisme negara sering kali tidak cukup efektif tanpa adanya gerakan sosial yang kuat dari akar rumput. Oleh karena itu, Kang dkk menekankan pentingnya kampanye kesadaran publik dan mobilisasi sosial untuk menantang praktik gender yang sudah mengakar.

Dengan demikian, keterkaitan antara jurnal ini dan gerakan feminis seperti KWAU menjadi penting untuk menunjukkan bahwa kesetaraan

gender tidak dapat dicapai hanya melalui perubahan formal, tetapi juga memerlukan transformasi struktural dan normatif yang mendalam.

Literatur ke empat berjudul “Radical feminist translations and strategies: A South Korean case” yang ditulis Sang-Bin Lee (2023) membahas peran penerjemah dalam mengartikulasikan ideologi feminis melalui strategi penerjemahan yang inovatif dan subversif, khususnya dalam karya-karya yang diterbitkan oleh Yeolda Books, sebuah penerbit yang dikenal mendukung feminisme radikal dan trans-exclusionary radical feminism (TERF) dan menyoroti bagaimana feminisme radikal di Korea telah berkembang dengan cara yang unik, meskipun banyak ideologi dan strategi feminis global tetap diterjemahkan dan disesuaikan dengan konteks sosial dan politik lokal. Salah satu kontribusi besar dari feminisme radikal di Korea Selatan adalah penggambaran kekuatan negara dan budaya patriarki sebagai penghalang utama bagi kesetaraan gender yang sejati, serta bagaimana strategi untuk menantang struktur ini seringkali melibatkan kritik terhadap norma-norma sosial yang sangat mengakar.

Salah satu kontribusi besar dari feminisme radikal di Korea Selatan adalah penggambaran kekuatan negara dan budaya patriarki sebagai penghalang utama bagi kesetaraan gender yang sejati, serta bagaimana strategi untuk menantang struktur ini seringkali melibatkan kritik terhadap norma-norma sosial yang sangat mengakar. Lee (2023) menunjukkan bahwa feminisme radikal di Korea tidak hanya berfokus pada perubahan hukum atau kebijakan, tetapi juga berupaya mendekonstruksi hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh konkret yang disorot dalam penelitian ini adalah bagaimana gerakan feminis radikal melawan kekerasan terhadap perempuan, penindasan di tempat kerja, serta ketidaksetaraan dalam peran rumah tangga dan keluarga. Feminisme radikal yang diterjemahkan di Korea Selatan memerlukan pendekatan yang lebih tegas dan menantang terhadap struktur sosial yang lebih besar, seperti keluarga, hukum, dan pasar kerja, dengan tujuan untuk mengubah dasar pemikiran patriarkal yang mengatur masyarakat.

Konsep-konsep yang dikemukakan oleh Lee (2023) dapat langsung terkait dengan advokasi yang dilakukan oleh Korean Women's Associations United (KWAU), sebuah kelompok feminis yang aktif dalam mengadvokasi kebijakan untuk menciptakan kesetaraan gender yang lebih substansial di Korea Selatan. KWAU telah lama berjuang untuk mendobrak sistem patriarki yang mendalam melalui kampanye-kampanye yang menuntut reformasi di berbagai sektor, mulai dari ketenagakerjaan hingga hak-hak sosial dan budaya perempuan. Dalam kaitannya dengan teori feminisme radikal yang digagas oleh Lee (2023), KWAU mengadopsi pendekatan yang serupa dalam menantang ketidaksetaraan gender yang tidak hanya bersifat legal, tetapi juga struktural dan normatif.

Lee menganalisis empat terjemahan karya Hyedam Yu, seorang penerjemah utama di Yeolda Books, untuk mengidentifikasi strategi penerjemahan yang digunakan dalam menyampaikan pengalaman perempuan secara kreatif dan mengganggu norma bahasa konvensional. Strategi-strategi ini mencakup penggunaan bahasa eksperimental dan pilihan leksikal yang menekankan pengalaman perempuan, serta penolakan terhadap istilah-istilah yang dianggap misoginis. Misalnya, dalam terjemahan Yu, istilah seperti "성매매" (perdagangan seks) digantikan dengan "성착취" (eksploitasi seksual) untuk menyoroti aspek kekerasan dan eksploitasi dalam konteks tersebut.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya paratekstualitas dalam penerjemahan feminis, termasuk penggunaan kata pengantar dan catatan penerjemah sebagai ruang untuk menyampaikan ideologi dan kritik sosial.

Dengan demikian, karya Lee (2023) memberikan wawasan yang sangat penting dalam memahami bagaimana gerakan feminisme radikal di Korea, termasuk melalui KWAU, berusaha untuk mendorong perubahan tidak hanya di tingkat kebijakan tetapi juga dalam transformasi budaya dan sosial.

Literatur kelima berjudul “Nationalizing Transnationalism: A Comparative Study of the “Comfort Women” Social Movement in China, Taiwan, and South Korea” yang di tulis oleh María del Pilar Álvarez (2020) ini membahas bagaimana gerakan sosial yang memperjuangkan keadilan bagi para korban "comfort women" berkembang di tiga negara—China, Taiwan, dan Korea Selatan—dengan fokus pada dinamika antara transnasionalisme dan nasionalisme dalam masing-masing konteks politik dan sosial. Norma menunjukkan bahwa meskipun isu ini bersifat transnasional—karena berkaitan dengan kejahatan perang dan hak asasi manusia global—dalam praktiknya, ia kerap "dinasionalisasi" atau disesuaikan dengan agenda politik domestik masing-masing negara. bagaimana LSM dan organisasi perempuan seperti *Korean Council* dan *Korean Women's Associations United (KWAU)* memainkan peran penting dalam menginternasionalkan isu comfort women. Mereka berhasil membingkai isu ini tidak hanya sebagai pelanggaran HAM masa lalu, tetapi juga sebagai representasi ketidaksetaraan gender yang masih berlangsung. Gerakan ini turut menekankan pentingnya keadilan gender sebagai bagian dari rekonsiliasi historis dan reformasi sosial di Korea Selatan.

Keterlibatan KWAU dalam isu comfort women mencerminkan pendekatan feminisme radikal yang fokus pada transformasi struktur patriarki serta feminisme liberal yang menekankan pada hak-hak individu perempuan di ranah publik dan politik. KWAU sebagai organisasi payung berbagai kelompok perempuan menunjukkan kapasitasnya dalam melakukan advokasi multi-level baik di tingkat nasional melalui tekanan terhadap kebijakan pemerintah Korea Selatan, maupun di tingkat internasional melalui kemitraan dengan aktor transnasional

Di Korea Selatan, misalnya, gerakan ini mendapat dukungan luas dari LSM dan negara, serta berhasil membangun solidaritas global melalui kerja sama dengan aktor internasional seperti UN Women. Sebaliknya, di Taiwan dan Tiongkok, isu comfort women cenderung dimanfaatkan secara politis—di Taiwan sebagai bagian dari identitas nasional pasca kolonial, dan di Tiongkok sebagai alat untuk membangun narasi anti-Jepang. Norma

menekankan bahwa keberhasilan gerakan sosial dalam mengadvokasi korban sangat bergantung pada hubungan antara masyarakat sipil, negara, dan komunitas internasional.

Literatur keenam berjudul “The Shifthing From The Male Gaze To The Female Gaze In K-pop Girl Groups As The Impact Of #MeToo Movement In South Korea” yang ditulis oleh Natasya Kusumawardani dan Enya Achresia Varianna (2024) membahas tentang bagaimana gerakan #MeToo di Korea Selatan memengaruhi perubahan dalam representasi visual dan naratif girl group K-Pop, khususnya dalam hal sudut pandang gender. Dalam banyak aspek, industri K-pop biasanya menciptakan citra perempuan yang sangat seksual dan terbatas dalam peran mereka. Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran sosial mengenai pelecehan seksual dan ketidaksetaraan gender melalui gerakan #MeToo, ada transisi menuju pembukaan ruang bagi perempuan untuk mengekspresikan diri mereka dengan cara yang lebih otonom dan autentik.

Dalam kajiannya, penulis menyoroti pergeseran dari male gaze—konsep di mana perempuan direpresentasikan sebagai objek visual bagi kepentingan laki-laki—ke arah female gaze, di mana perempuan mulai diposisikan sebagai subjek aktif yang memiliki agensi dalam menampilkan diri mereka. Transformasi ini tidak terlepas dari tekanan sosial dan budaya yang ditimbulkan oleh gerakan #MeToo, yang mendorong kesadaran baru dalam industri hiburan mengenai pentingnya representasi perempuan yang setara dan bebas dari objektifikasi seksual.

KWAU, sebagai organisasi feminis yang berpengaruh di Korea Selatan, telah lama memperjuangkan kesetaraan gender dan menantang berbagai bentuk ketidaksetaraan yang dialami perempuan dalam berbagai sektor, termasuk media dan hiburan. KWAU berperan dalam mengadvokasi isu-isu terkait pelecehan seksual, kesetaraan kesempatan kerja, dan hak-hak reproduktif perempuan. Peran KWAU berinteraksi dengan gerakan sosial internasional seperti #MeToo untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama dalam industri hiburan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam jurnal,

gerakan #MeToo telah membantu meningkatkan kesadaran akan masalah pelecehan seksual, dan ini membuka peluang bagi feminisme untuk lebih dipahami dalam konteks budaya pop Korea. KWAU juga secara aktif memanfaatkan platform-platform ini untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, bukan hanya dalam dunia kerja tetapi juga di bidang hiburan.

Penelitian ini memperkuat argumen bahwa gerakan feminis transnasional, seperti #MeToo, dapat memengaruhi praktik budaya lokal, termasuk dalam industri hiburan seperti K-Pop. Selain itu, artikel ini memberikan kontribusi penting dalam memahami relasi antara aktivisme gender dan transformasi simbolik dalam budaya populer, yang relevan dengan fokus penelitian ini mengenai advokasi feminisme dan pengaruhnya dalam konteks Korea Selatan.

Literatur ketujuh berjudul “Analisis Gender Based Violence dalam Konvensi Cedaw pada Isu Kekerasan Seksual di Korea Selatan” yang ditulis oleh Kardina dan Anisa Marlinda Yurisa (2021). Penelitian ini membahas bagaimana kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan berbasis gender dianalisis dalam kerangka hukum internasional, khususnya Konvensi CEDAW, serta bagaimana implementasi norma-norma tersebut diterapkan dalam konteks domestik Korea Selatan.

Penelitian ini menyoroti adanya kesenjangan antara komitmen internasional Korea Selatan sebagai negara pihak dalam CEDAW dengan realitas pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Namun, meskipun Korea Selatan telah meratifikasi CEDAW dan mengimplementasikan beberapa langkah hukum untuk menangani kekerasan seksual, artikel ini mengungkapkan bahwa terdapat kesenjangan yang signifikan dalam penerapan kebijakan tersebut di lapangan. Beberapa tantangan utama yang dibahas dalam artikel ini termasuk lemahnya sistem peradilan, kurangnya dukungan bagi korban, serta budaya patriarkal yang sering kali menghambat perempuan untuk melaporkan kekerasan seksual. Meskipun ada hukum yang ada, praktik sosial dan budaya yang masih dominan di Korea Selatan sering kali

menempatkan beban pada korban, dan bukan pelaku, yang menghalangi perempuan untuk mendapatkan keadilan yang mereka butuhkan.

KWAU berperan penting dalam advokasi perubahan sosial di Korea Selatan juga memiliki peran dalam mengkritik implementasi CEDAW oleh negara tersebut. Organisasi ini telah lama menyoroti ketidakcukupan tindakan yang diambil oleh pemerintah Korea Selatan dalam menghadapi kekerasan berbasis gender, serta tantangan sistemik yang menghalangi korban untuk mendapatkan keadilan yang layak. Misalnya, KWAU sering menyoroti kegagalan sistem hukum dalam mendukung korban kekerasan seksual, serta pentingnya memperkuat mekanisme perlindungan dan dukungan untuk perempuan yang mengalami kekerasan.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap kajian kekerasan berbasis sexual orientation dengan menekankan bahwa keberadaan norma internasional saja tidak cukup tanpa adanya komitmen nyata dari negara serta partisipasi aktif dari masyarakat sipil, khususnya kelompok advokasi perempuan. Oleh karena itu, jurnal ini menjadi landasan penting dalam memahami kompleksitas antara hukum internasional dan dinamika sosial-politik domestik dalam isu kekerasan terhadap perempuan di Korea Selatan.

Literatur ke delapan berjudul “Legislative Pioneers: The Brave South Korean Women Spearheading Change Against Gender Discrimination, Violence, and Inequality Through Progressive Laws” yang ditulis oleh Abdul Qayyum Gondal dan Zulkarnan Hatta (2024) membahas peran krusial legislator perempuan dalam menginisiasi dan mendorong perubahan hukum yang progresif sebagai upaya melawan diskriminasi gender, kekerasan berbasis gender, dan ketimpangan struktural di Korea Selatan.

KWAU, sebagai jaringan organisasi perempuan terbesar di Korea Selatan, telah aktif dalam memperjuangkan legislatif yang lebih adil bagi perempuan. Mereka berkolaborasi dengan lembaga-lembaga pemerintah, seperti yang dijelaskan dalam jurnal, untuk mengimplementasikan undang-

undang yang melindungi hak-hak perempuan. Misalnya, KWAU memainkan peran penting dalam mendorong perubahan yang mendukung lebih banyak perempuan di tempat kerja, kebijakan yang lebih baik untuk menangani kekerasan berbasis gender, serta memperjuangkan representasi politik perempuan.

Dalam konteks advokasi feminisme, KWAU mengusung berbagai prinsip feminisme liberal yang bertujuan untuk memodifikasi kebijakan agar lebih mendukung kesetaraan dalam aspek hukum dan sosial, seperti yang diidentifikasi oleh para legislator perempuan dalam jurnal tersebut. KWAU juga berkontribusi dalam memperkenalkan prinsip feminisme radikal, dengan menekankan pentingnya tidak hanya perubahan kebijakan, tetapi juga perubahan sosial yang lebih mendalam, terkait dengan pembongkaran struktur patriarkal yang telah lama mendominasi Korea Selatan.

Secara lebih luas, KWAU dan legislator perempuan yang disebut dalam jurnal ini bersama-sama mendukung agenda feminisme dalam konteks politik dan legislatif. Mereka berusaha mengatasi ketidaksetaraan struktural dengan cara yang mengintegrasikan berbagai perspektif feminisme, terutama dalam mendorong kesetaraan dalam hukum dan peran sosial perempuan di masyarakat.

Temuan dalam studi ini menunjukkan bahwa advokasi yang dilakukan oleh perempuan di ranah legislatif tidak hanya bersifat simbolik, tetapi memiliki dampak nyata terhadap perubahan sosial dan hukum. Artikel ini memperkuat argumen bahwa perjuangan feminis dalam sistem politik formal merupakan strategi penting dalam mendorong keadilan gender, khususnya di negara yang memiliki sejarah panjang dominasi patriarki seperti Korea Selatan.

Literatur kesembilan berjudul “Gender wars” and populist politics in South Korea” yang ditulis oleh Kyungja Jung (2024) membahas tentang bagaimana konflik gender dimanfaatkan sebagai alat politik oleh politisi populis konservatif, khususnya selama pemilihan presiden Korea Selatan tahun 2022. Strategi politik ini melibatkan eksploitasi sentimen anti-feminis

untuk menarik pemilih muda laki-laki, terutama melalui narasi bahwa feminisme mengancam posisi sosial laki-laki dalam masyarakat.

Dalam jurnal ini menunjukkan strategi populisme gender ini juga terjadi di negara-negara Barat, terdapat konteks yang unik di Korea Selatan. Isu-isu seperti wajib militer, angka kelahiran yang rendah, dan pembubaran Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga menjadi sorotan utama dalam diskursus politik yang dibentuk oleh aktor populis. Melalui pendekatan ini, politisi dapat memanfaatkan rasa krisis maskulinitas yang dialami oleh sebagian laki-laki muda, dengan menekankan pendekatan emosional untuk menggalang dukungan dan memberikan kontribusi penting dalam memahami keterkaitan antara politik populis dan kesetaraan sexual orientation di Korea Selatan. Artikel ini juga memperlihatkan bagaimana narasi gender yang dipolitisasi dapat memengaruhi arah kebijakan dan opini publik.

KWAU berada di garis depan dalam perjuangan untuk mengatasi ketegangan gender yang diperburuk oleh politik populis. Salah satu tantangan yang dihadapi KWAU adalah bagaimana merespons narasi-narasi yang sering kali mempolarisasi opini tentang feminisme. Sebagaimana dijelaskan dalam jurnal Kyungja Jung, populisme di Korea Selatan sering kali mengasosiasikan gerakan feminisme dengan kebijakan yang dianggap merugikan laki-laki atau dengan narasi yang memperburuk hubungan antara laki-laki dan perempuan. KWAU, dalam hal ini, menghadapi tantangan besar dalam membangun konsensus dan mendorong perubahan kebijakan di tengah polarisasi ini.

Namun, KWAU tetap berupaya untuk mengedukasi publik dan menciptakan ruang untuk diskusi yang lebih konstruktif mengenai kesetaraan gender. Advokasi mereka menekankan pentingnya kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada perempuan, serta upaya untuk meredakan ketegangan gender yang dibawa oleh politik populis. Selain itu, KWAU juga berfokus pada kolaborasi dengan berbagai sektor masyarakat

untuk meminimalkan efek negatif dari polarisasi yang dipicu oleh politik populis terhadap kebijakan gender.

Literatur ke sepuluh berjudul “The Resurgence and Popularization of Feminism in South Korea: Key Issues and Challenges for Contemporary Feminist Activism” yang ditulis oleh Jinsook Kim (2021) membahas tentang kebangkitan kembali dan popularisasi feminisme di Korea Selatan sejak tahun 2015. Dalam jurnal ini menyoroti bagaimana aktivisme feminis mengalami perluasan dalam hal cakupan, jangkauan, dan agenda, terutama melalui pemanfaatan media digital.

Advokasi feminisme KWAU sejalan dengan beberapa tema yang diangkat oleh Kim dalam jurnalnya. KWAU, melalui berbagai kampanye dan gerakan, telah menjadi bagian dari kebangkitan dan popularisasi feminisme di Korea Selatan, terlepas dari tantangan dan perlawanan dari kelompok konservatif yang disebutkan oleh Kim. Misalnya, KWAU aktif dalam mempromosikan kebijakan yang lebih berpihak pada perempuan, seperti peningkatan representasi perempuan di politik dan pemerintahan, serta mendorong pengesahan undang-undang yang lebih kuat terkait dengan pencegahan kekerasan berbasis gender.

Isu-isu sentral yang dibahas dalam jurnal, seperti kekerasan seksual, kesenjangan upah, dan representasi perempuan dalam politik, juga merupakan fokus utama bagi KWAU. KWAU berperan dalam melobi pemerintah untuk memperkuat kebijakan yang mendukung hak-hak perempuan, khususnya dalam hal perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dan pemberdayaan ekonomi perempuan.

Namun, KWAU juga menghadapi tantangan yang serupa dengan gerakan feminisme yang lebih luas, sebagaimana diidentifikasi oleh Kim dalam jurnalnya. Salah satu tantangan besar bagi KWAU adalah bagaimana mengatasi resistensi dari kelompok konservatif yang sering kali mengkritik gerakan feminis sebagai ancaman terhadap tatanan sosial tradisional. KWAU juga harus berhadapan dengan internalitas gerakan feminis, di mana

ada perbedaan pendapat mengenai strategi dan pendekatan yang harus diambil dalam memperjuangkan kesetaraan gender.

Menurut peneliti dengan menempatkan kebangkitan feminisme dalam konteks sejarah dan sosial-politik Korea Selatan, termasuk diversifikasi gerakan sosial pasca-otoritarianisme, posisi perempuan yang rentan, dan meningkatnya misogini. Salah satu karakteristik utama dari aktivisme feminis kontemporer adalah penggunaan media digital sebagai alat untuk memperluas subjek feminis, memperluas lokasi dan metode perjuangan, serta memusatkan isu-isu gender dalam lingkungan digital.

Literatur kesebelas berjudul “I Am A Feminist, But . . .” *Practicing Quiet Feminism in the Era of Everyday Backlash in South Korea* yang ditulis oleh Gowoon Jung dan Minyoung Moon (2024) membahas tentang praktik feminisme di kalangan mahasiswa Korea Selatan di tengah meningkatnya sentimen anti-feminis. Fokus utama dari penelitian ini adalah bagaimana perempuan yang mengidentifikasi diri sebagai feminis di Korea Selatan tetap mempertahankan praktik feminisme mereka dalam kehidupan sehari-hari, meskipun ada berbagai tantangan sosial yang berasal dari reaksi balik terhadap feminisme. Konsep “quiet feminism” yang dibahas dalam jurnal ini menggambarkan bagaimana individu memilih untuk mengamalkan feminisme mereka dengan cara yang lebih pribadi dan tidak terlalu terang-terangan, menghindari konfrontasi dengan budaya patriarki yang masih kuat di Korea Selatan. Melalui wawancara dengan 40 mahasiswa, penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar responden mengidentifikasi diri sebagai feminis yang menjalankan aktivitas feminis secara privat di lingkungan kampus. Fenomena ini disebut sebagai quiet feminism, yaitu bentuk aktivisme feminis yang dilakukan secara diam-diam untuk menghindari backlash atau reaksi negatif dari masyarakat yang masih memandang feminisme secara negatif.

Dalam jurnal ini terdapat adanya fenomena “quiet feminism,” di mana banyak perempuan Korea Selatan yang menyatakan diri mereka sebagai feminis tetapi memilih untuk menghindari eskalasi publik karena

adanya backlash sosial terhadap gerakan feminisme. Ini terkait dengan kenyataan bahwa feminisme, meskipun semakin berkembang, masih sering diserang dan dipersepsikan secara negatif oleh sebagian besar masyarakat Korea.

Di sisi lain, KWAU lebih mengedepankan advokasi yang lebih langsung dan terbuka dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Meskipun demikian, KWAU juga menghadapi tantangan serupa dalam menghadapi backlash terhadap feminisme, terutama terkait dengan stereotip yang melekat pada gerakan tersebut.

Penelitian ini menunjukkan bahwa backlash terhadap feminisme di Korea Selatan tidak hanya terjadi di ranah publik, tetapi juga dalam interaksi sehari-hari, baik online maupun offline. Akibatnya, banyak mahasiswi memilih untuk tidak secara terbuka mengungkapkan identitas feminis mereka dan lebih memilih ruang-ruang aman di kampus untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman.

Terdapat ada kesulitan dalam menyemangati semangat feminisme dengan cara yang terbuka, banyak perempuan Korea Selatan tetap berusaha untuk mendorong perubahan dalam hal kebijakan sosial, seperti peraturan ketenagakerjaan yang lebih adil dan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender. KWAU secara aktif terlibat dalam advokasi kebijakan publik dan sosial, berjuang untuk perubahan legislasi terkait hak-hak perempuan, yang mencakup kampanye untuk penghapusan kekerasan berbasis gender, perbaikan kondisi kerja perempuan, dan pendidikan seksual yang lebih inklusif.

Studi ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana feminisme dijalankan dalam konteks sosial yang tidak mendukung, serta bagaimana individu menavigasi identitas dan aktivitas mereka dalam menghadapi tekanan sosial. Pendekatan KWAU bisa dianggap sebagai bentuk respon terhadap realitas backlash yang dibahas dalam jurnal ini, namun dengan intensi untuk menciptakan perubahan struktural dan

kebijakan yang mendalam, meskipun ada tantangan dalam menghadapi opini publik yang tidak mendukung.

Literatur kedua belas berjudul "An Examination of Women's Rights in South Korea: From 'New Women' to Female Idols" yang ditulis oleh Cece Trifoso (2022) membahas tentang evolusi hak-hak perempuan di Korea Selatan dari era kolonial hingga masa kini. Penelitian ini menyoroti bagaimana konsep "New Women" pada awal abad ke-20, yang menekankan pendidikan dan peran domestik perempuan sebagai "istri yang baik dan ibu yang bijak," telah berkembang menjadi bentuk ekspresi feminisme yang lebih modern melalui budaya populer, khususnya industri K-pop. Terdapat perubahan signifikan dalam peran perempuan di Korea Selatan dari gerakan "New Women" pada awal abad ke-20, yang mengadvokasi hak pendidikan dan kebebasan lebih besar untuk perempuan, hingga munculnya fenomena idola perempuan K-pop yang sekarang menjadi simbol kemajuan perempuan dalam media pop. Namun, meskipun banyak kemajuan telah dicapai dalam representasi perempuan di media, seperti dalam K-pop, peran perempuan dalam budaya K-pop seringkali masih terjebak dalam stereotip dan ekspektasi yang memperkuat norma-norma patriarkal. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi feminisme yang ingin merombak pandangan tradisional tentang perempuan.

Dalam jurnal ini menyoroti bagaimana industri hiburan, terutama K-pop, berperan dalam membentuk citra perempuan. Di satu sisi, idola perempuan dianggap sebagai simbol kebebasan dan kesetaraan, tetapi di sisi lain, mereka seringkali menjadi objek konsumsi yang masih dibatasi oleh norma-norma patriarkal, seperti penekanan pada penampilan fisik dan peran feminin yang tradisional.

KWAU berusaha untuk menghadapi fenomena seperti ini dengan mendorong representasi yang lebih adil dan bebas dari stereotip. KWAU menekankan pentingnya perubahan struktural di tingkat kebijakan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi perempuan, baik dalam industri hiburan maupun di luar itu. Misalnya, mereka mendukung perubahan

kebijakan dalam industri media dan hiburan untuk melawan eksploitasi perempuan, serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya representasi yang lebih beragam dan inklusif.

Penulis menjelaskan terdapat nilai-nilai Konfusianisme dan struktur sosial patriarkal memengaruhi posisi perempuan dalam masyarakat Korea. Penulis juga membahas bagaimana gerakan feminis kontemporer, termasuk gerakan #MeToo dan aktivisme online, telah menantang norma-norma tradisional tersebut. Namun, meskipun ada kemajuan, perempuan Korea Selatan masih menghadapi tantangan signifikan, seperti standar kecantikan yang ketat, ketimpangan gender di tempat kerja, dan representasi yang terbatas dalam politik.

Literatur ketiga belas berjudul “Feminism, Education and Gender Equality-a Review” yang ditulis oleh Jaysawal dan Saha (2023) membahas peran pendidikan dalam memajukan kesetaraan gender melalui lensa berbagai gelombang feminisme. Mereka menelusuri bagaimana pendidikan telah menjadi alat penting dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan mengatasi ketidaksetaraan gender yang berakar pada struktur sosial patriarkal.

Penulis menyoroti bahwa feminisme telah mengalami evolusi melalui beberapa gelombang:

- Gelombang Pertama: Fokus pada hak-hak hukum dan politik, seperti hak memilih.
- Gelombang Kedua: Menekankan isu-isu sosial dan budaya, termasuk peran gender dan kesetaraan di tempat kerja.
- Gelombang Ketiga: Mengadopsi pendekatan interseksional,
- Gelombang Keempat: Mempertimbangkan bagaimana faktor-faktor seperti ras, kelas, dan orientasi seksual berinteraksi dengan gender.

Salah satu aspek yang dibahas dalam jurnal ini adalah pentingnya pendidikan gender dalam menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan setara gender. Pembentukan kebijakan pendidikan yang mendukung

kesetaraan gender berperan dalam memastikan bahwa pendidikan tidak hanya memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki tetapi juga mengubah persepsi budaya tentang peran perempuan dalam masyarakat.

Terdapat penekanan bahwa pendidikan tidak hanya mengajarkan keterampilan akademik, tetapi juga dapat menjadi alat untuk mendobrak batasan-batasan sosial yang dibangun atas dasar gender. Pendidikan yang sensitif terhadap gender dapat membantu perempuan mengembangkan rasa percaya diri, mengurangi ketergantungan pada struktur patriarkal, dan memberikan mereka kesempatan untuk mengejar karier dan aspirasi mereka.

KWAU dalam bidang ini telah banyak terlibat dalam advokasi kebijakan pendidikan yang mendukung kesetaraan gender. Mereka mendorong kebijakan yang mengintegrasikan pendidikan kesetaraan gender ke dalam kurikulum sekolah, serta kampanye untuk mengurangi kesenjangan gender di bidang pendidikan. KWAU juga mengadvokasi perlindungan terhadap perempuan di kampus dan sekolah dari kekerasan berbasis gender, serta memastikan adanya perlakuan yang adil dan setara di dunia pendidikan.

Pendidikan dianggap sebagai sarana untuk membongkar norma-norma gender tradisional dan memberdayakan individu untuk berpikir kritis tentang peran gender dalam masyarakat. Dengan mengintegrasikan perspektif feminis dalam kurikulum dan praktik pengajaran, institusi pendidikan dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan setara.

Literatur keempat belas berjudul “The Influence of Feminist Ideology on the Awakening of Women's Awareness of Equal Rights in East Asia: A Comparative Scope with China and South Korea” yang ditulis oleh Xuanya Huang dan Zijian Liu (2023) membahas tentang bagaimana ideologi feminis telah memengaruhi kesadaran perempuan terhadap hak-hak setara di Tiongkok dan Korea Selatan. Studi ini menyoroti bahwa meskipun kedua negara telah mengadopsi undang-undang untuk melindungi hak-hak perempuan—seperti Law on the Protection of Women's Rights and Interests

di Tiongkok pada 2023 dan kebijakan afirmatif di Korea Selatan sejak 2006—tantangan struktural masih menghambat pencapaian kesetaraan gender yang sejati.

Di China terdapat warisan feodalisme selama lebih dari 2.000 tahun telah meninggalkan jejak mendalam dalam budaya patriarki, yang sulit dihapus meskipun ada reformasi hukum. Sementara itu, di Korea Selatan, nilai-nilai Konfusianisme terus memengaruhi persepsi masyarakat terhadap peran gender, meskipun patriarki secara resmi dihapuskan pada 2008.

Artikel ini juga membahas peran gerakan sosial seperti #MeToo dalam meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu gender. Di Korea Selatan, gerakan ini telah memicu perubahan kebijakan dan diskusi publik yang luas. Sebaliknya, di Tiongkok, gerakan serupa menghadapi hambatan signifikan karena kontrol pemerintah terhadap media dan organisasi masyarakat sipil.

Di Korea Selatan, meskipun telah terjadi kemajuan dalam kesetaraan gender, masih banyak tantangan yang dihadapi perempuan, terutama terkait dengan norma-norma tradisional dan patriarki yang masih kuat. Namun, setelah pergerakan feminisme seperti yang didorong oleh KWAU, banyak perempuan yang mulai mengangkat isu-isu seperti kekerasan domestik, kesenjangan upah, dan diskriminasi gender. KWAU, sebagai salah satu organisasi feminis terkemuka, telah memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Korea Selatan, dan upaya mereka terkait erat dengan proses yang dijelaskan dalam jurnal ini.

Penulis menyimpulkan bahwa meskipun ada kemajuan legislatif, perubahan budaya dan sosial yang mendalam masih diperlukan untuk mencapai kesetaraan gender yang substansial di kedua negara. Studi ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana ideologi feminis dapat memengaruhi kesadaran dan perjuangan perempuan dalam konteks budaya dan politik yang berbeda.

Literatur ke lima belas berjudul “Misogyny and Gender Conflicts in South Korea” yang ditulis oleh Jimin Kim (2024) membahas bagaimana perkembangan pesat Korea Selatan sejak tahun 1960-an telah menciptakan dualitas sosial yang kompleks dan fokus pada bagaimana ketimpangan gender dan stereotip terhadap perempuan terus mengakar dalam masyarakat. Penulis menganalisis dinamika sosial, politik, dan budaya yang memengaruhi perempuan di Korea Selatan, serta peran misogini dalam memperkuat perbedaan gender dan ketidaksetaraan. Penulis mengungkapkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam kesetaraan gender, misalnya melalui kebijakan yang memperjuangkan hak-hak perempuan, perlawanan terhadap gerakan feminis di Korea Selatan semakin kuat. Fenomena misogini ini tidak hanya dilihat sebagai masalah individu atau budaya, tetapi juga sebagai struktur sosial yang melibatkan banyak pihak, termasuk politik, media, dan kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

Misogini di Korea Selatan berakar pada tradisi patriarkal yang kuat, di mana perempuan sering kali dipandang sebagai pihak yang lebih rendah dibandingkan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Konsep "gender conflicts" yang dibahas dalam jurnal ini mengarah pada ketegangan antara kelompok-kelompok yang memperjuangkan kesetaraan gender (termasuk feminis) dan mereka yang mempertahankan nilai-nilai patriarkal. Kim menyebutkan bahwa meskipun perempuan telah memperoleh banyak hak politik, sosial, dan ekonomi, diskriminasi terhadap mereka masih sangat terlihat dalam hal upah yang lebih rendah, posisi kekuasaan yang terbatas, dan kekerasan berbasis gender.

Korean Women's Associations United (KWAU), sebagai salah satu organisasi feminis terkemuka di Korea Selatan, memainkan peran penting dalam menanggapi fenomena misogini dan ketidaksetaraan gender di negara tersebut. Dalam konteks jurnal Kim, peran Korean Women's Associations United (KWAU) dalam memperjuangkan kesetaraan gender sangat relevan dengan analisis konflik gender yang ada. Korean Women's Associations United (KWAU) telah lama mengadvokasi hak-hak perempuan melalui

kampanye terhadap kekerasan gender, diskriminasi di tempat kerja, dan peran perempuan dalam politik.

Peneliti menggambarkan bagaimana gerakan feminis di Korea Selatan terus berhadapan dengan tantangan besar, salah satunya adalah meningkatnya sentimen anti-feminisme, yang didorong oleh persepsi bahwa feminisme terlalu mengutamakan hak-hak perempuan, mengabaikan ketidakadilan yang dialami oleh pria. Dalam konteks ini, Korean Women's Associations United (KWAU) bertindak sebagai penyeimbang, berusaha untuk menjaga suara perempuan tetap terdengar dalam perdebatan yang sering kali didominasi oleh kelompok konservatif dan anti-feminisme.

Korean Women's Associations United (KWAU) telah berusaha mengatasi dan memperbaiki ketimpangan gender melalui berbagai inisiatif, seperti advokasi untuk perubahan kebijakan, penyuluhan kepada masyarakat mengenai kesetaraan gender, dan membangun solidaritas di antara perempuan di seluruh lapisan masyarakat. Misalnya, dalam upaya mengatasi kekerasan terhadap perempuan, Korean Women's Associations United (KWAU) terlibat dalam perubahan kebijakan yang lebih mendukung perlindungan terhadap perempuan, yang tercermin dalam keberhasilan mereka mendorong pengesahan undang-undang yang melindungi perempuan dari kekerasan.

Meskipun Korea Selatan telah menjadi kekuatan ekonomi dan teknologi global, norma-norma gender tradisional tetap kuat dan sulit diubah. Konflik gender di Korea Selatan tidak hanya mencerminkan ketimpangan struktural, tetapi juga ketegangan budaya yang mendalam antara nilai-nilai patriarkal dan aspirasi kesetaraan gender.

Penelitian ini menyoroti peran media digital dalam memperkuat wacana misoginis, terutama di kalangan pria muda yang merasa terpinggirkan secara sosial dan ekonomi. Sentimen anti-feminis sering kali dipicu oleh persepsi bahwa gerakan feminis mengancam stabilitas sosial dan peluang ekonomi mereka. Hal ini menciptakan lingkungan yang mempersulit perempuan untuk mengekspresikan identitas feminis secara

terbuka, mendorong munculnya bentuk aktivisme yang lebih tersembunyi atau quiet feminism.

Literatur keenam belas berjudul “The Cause and Impact of gender Inequality in South Korea Workplaces” yang ditulis oleh Tong mu (2024) membahas berbagai faktor yang menyebabkan ketimpangan gender di tempat kerja di Korea Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis bagaimana peran gender tradisional, budaya kerja yang menekankan senioritas dan hierarki, serta lemahnya penegakan hukum berkontribusi terhadap ketidaksetaraan gender di lingkungan kerja. Salah satu temuan utama adalah bahwa stereotip gender yang mengakar dalam budaya tradisional Korea Selatan menyebabkan perempuan sering dianggap kurang kompeten dan kurang kompetitif dibandingkan laki-laki. Selain itu, fenomena the glass ceiling (langit-langit kaca) menjadi masalah signifikan di mana perempuan kesulitan untuk naik ke posisi manajerial atau eksekutif meskipun memiliki kualifikasi dan kemampuan yang setara dengan laki-laki. Di tempat kerja, stereotip mengenai peran tradisional perempuan sebagai ibu atau istri juga membatasi kesempatan mereka dalam mencapai keseimbangan kehidupan kerja yang sehat, mengingat adanya ekspektasi bahwa mereka harus mengutamakan keluarga di atas karier mereka. Hal ini berdampak pada proses rekrutmen dan promosi, di mana kemampuan dan nilai perempuan seringkali diremehkan, sehingga mereka mendapatkan lebih sedikit peluang dan sumber daya.

Korean Women’s Associations United (KWAU) telah lama terlibat dalam advokasi kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi diskriminasi gender di tempat kerja. Organisasi ini berusaha mengatasi masalah ketidaksetaraan upah antara pria dan wanita, mendorong perubahan kebijakan untuk memperkenalkan cuti melahirkan yang lebih baik, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih ramah keluarga. Selain itu, *Korean Women’s Associations United (KWAU)* berperan dalam mendorong perusahaan-perusahaan untuk memiliki lebih banyak kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan melawan diskriminasi berbasis gender dalam perekrutan dan promosi.

Melalui berbagai kampanye, *Korean Women's Associations United (KWAU)* juga mengedukasi publik tentang pentingnya kesetaraan gender dan dampak negatif dari ketidaksetaraan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Mereka berusaha untuk mengubah sikap masyarakat terhadap perempuan di tempat kerja dan menghapus stereotip yang sering kali menghalangi perempuan untuk mendapatkan peluang yang sama di dunia kerja.

Dalam pendekatan feminisme radikal yang lebih menekankan pada perubahan struktural dalam masyarakat juga sangat relevan, mengingat *Korean Women's Associations United (KWAU)* berfokus pada perubahan dalam norma sosial dan kebijakan yang mendiskriminasi perempuan. Penulis juga dapat dihubungkan dengan teori intersectionality, yang menyoroti bagaimana berbagai faktor seperti gender, kelas sosial, dan status ekonomi berinteraksi untuk mempengaruhi pengalaman perempuan di tempat kerja. Dalam hal ini, *Korean Women's Associations United (KWAU)* mencoba untuk memperhatikan pengalaman perempuan dari berbagai latar belakang yang mungkin menghadapi bentuk diskriminasi ganda atau lebih.

Penelitian ini juga menyoroti bahwa ketimpangan gender di tempat kerja memiliki dampak multifaset. Pertama, hal ini membatasi perkembangan karier dan kemandirian ekonomi perempuan, mencegah mereka menikmati perlakuan yang setara dengan laki-laki dalam hal pekerjaan, promosi, dan gaji. Kedua, ketimpangan gender juga memperburuk konflik dan ketegangan dalam keluarga, menghasilkan tekanan lebih besar bagi perempuan untuk menyeimbangkan pekerjaan dan keluarga.

Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika ketimpangan gender di tempat kerja di Korea Selatan, serta bagaimana faktor-faktor budaya dan struktural berinteraksi dalam membentuk lanskap ketenagakerjaan yang tidak setara.

Literatur ketujuh belas berjudul "Reception and revision of women-related translation paratexts: South Korean cases" yang ditulis oleh Sang-

Bin Lee (2020) membahas bagaimana paratekstual dalam terjemahan—seperti kata pengantar penerjemah, trailer bersubtitel, poster film yang ditranskripsi, dan teks promosi permainan seluler—menerima kritik dan revisi dalam konteks gerakan feminis di Korea Selatan. Studi ini menunjukkan bahwa perempuan Korea Selatan secara aktif menantang wacana misoginis dengan mengkritik dan menuntut revisi terhadap paratekstual yang dianggap tidak sesuai dengan perspektif gender yang adil.

Peneliti menguraikan bagaimana penerimaan terhadap terjemahan yang terkait dengan perempuan sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang ada di Korea Selatan. Teks yang berhubungan dengan isu gender dan perempuan dapat diterjemahkan dengan cara yang menyesuaikan atau mengubah pesan asli agar lebih sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Hal ini mengarah pada revisi parateks yang bisa menghilangkan, mengurangi, atau bahkan memperkuat pesan yang terkait dengan kesetaraan gender.

Revisi ini dapat dilakukan oleh penerjemah untuk berbagai alasan, mulai dari mempertimbangkan sensitivitas budaya hingga menyesuaikan dengan audiens yang diinginkan. Sebagai contoh, teks yang menggambarkan perempuan secara lebih progresif atau radikal bisa mengalami perubahan atau pembatasan dalam proses terjemahan untuk menghindari pergeseran besar dalam norma sosial yang diterima di Korea Selatan. Proses ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana revisi tersebut mendukung atau menghambat kemajuan kesetaraan gender.

Korean Women's Associations United (KWAU), sebagai organisasi feminis terkemuka di Korea Selatan, memiliki perhatian yang besar terhadap representasi perempuan dalam berbagai media, termasuk literatur dan terjemahan. Advokasi yang dilakukan oleh Korean Women's Associations United (KWAU) untuk kesetaraan gender di Korea Selatan sering kali melibatkan kampanye yang menantang stereotip gender yang telah lama tertanam dalam budaya Korea Selatan, termasuk dalam media dan teks-teks yang disebarluaskan. Teks terjemahan, terutama yang

berkaitan dengan isu perempuan, memainkan peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat tentang peran dan hak-hak perempuan.

Korean Women's Associations United (KWAU) seringkali mengkritik representasi perempuan yang terbatas dan stereotipikal, serta mendorong perubahan dalam narasi yang berkaitan dengan perempuan. Dalam konteks jurnal Lee, kita bisa melihat bagaimana parateks yang digunakan dalam terjemahan teks dapat menjadi alat untuk mengubah atau bahkan memperkuat representasi tersebut. Misalnya, revisi dalam terjemahan yang melibatkan penekanan pada peran tradisional perempuan atau pengurangan fokus pada pemberdayaan perempuan dapat bertentangan dengan upaya yang dilakukan oleh Korean Women's Associations United (KWAU) untuk memperkenalkan kesetaraan gender secara lebih adil dan setara.

Korean Women's Associations United KWAU juga telah mendukung penerjemahan karya-karya feminis yang mempromosikan pandangan lebih progresif tentang perempuan, seperti karya-karya yang memperjuangkan hak-hak perempuan di dunia kerja, kebijakan keluarga, dan kesetaraan sosial. Dalam hal ini, Korean Women's Associations United KWAU mengadvokasi agar teks terjemahan mencerminkan pemahaman yang lebih inklusif dan tidak mengabaikan isu-isu gender yang penting, seperti hak reproduksi dan kekerasan berbasis gender.

Peneliti menyoroti paratekstual memiliki peran penting dalam membentuk persepsi pembaca terhadap teks terjemahan, terutama dalam konteks ideologi gender. Misalnya, kata pengantar penerjemah dapat mencerminkan solidaritas transnasional dengan penulis asli dan mempengaruhi interpretasi pembaca terhadap isi buku. Selain itu, poster film dan teks promosi permainan seluler yang mengandung elemen misoginis telah menjadi sasaran kritik publik, yang mendorong revisi untuk mencerminkan perspektif gender yang lebih sensitif.

Dalam jurnal ini memberikan wawasan tentang bagaimana ideologi gender mempengaruhi penerimaan dan revisi paratekstual dalam

terjemahan, serta bagaimana paratekstual dan terjemahan saling terkait dalam konteks feminis. Hal ini menunjukkan pentingnya kesadaran gender dalam praktik penerjemahan dan produksi paratekstual untuk menciptakan representasi yang lebih adil dan inklusif.

Literatur ke delapan belas berjudul “The Role of Misogyny in the 2022 Korean Presidential Election: Understanding the Backlash against Feminism in Industrialized Democracies” yang ditulis oleh Jenkins dan Kim (2024) dalam artikel mereka yang diterbitkan di *Journal of East Asian Studies* membahas peran misogini dalam pemilihan presiden Korea Selatan tahun 2022. Mereka menyoroti bagaimana partai politik, khususnya Partai Kekuatan Rakyat (PPP), memanfaatkan sentimen anti-feminis untuk menarik dukungan pemilih pria muda yang merasa terancam oleh kemajuan feminisme dan kandidat konservatif khususnya Yoon Suk-yeol (yang pada saat itu akhirnya terpilih sebagai presiden) secara eksplisit menunggangi sentimen anti-feminis dan misoginis untuk meraih dukungan—terutama dari pemilih laki-laki muda berusia 20-30 tahun yang merasa terancam oleh agenda kesetaraan gender.

Namun, pasca Pemilu 2022, Korean Women’s Associations United (KWAU) menghadapi tantangan besar karena pemerintahan baru yang cenderung anti-feminis secara terbuka menolak keberadaan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga serta menyebut feminisme sebagai penyebab “konflik gender”.

Beberapa bentuk advokasi Korean Women’s Associations United (KWAU) yang dikaitkan dengan temuan jurnal ini antara lain:

- Melawan narasi misoginis melalui kampanye publik dan edukasi media.
- Membela keberadaan lembaga-lembaga pro-perempuan, seperti Kementerian Gender, yang menjadi target pembubaran oleh pemerintah konservatif.
- Mengorganisasi perempuan muda dan aktivis feminis untuk tetap aktif dalam gerakan sosial, bahkan ketika kondisi politik tidak mendukung.

- Mendorong keterwakilan perempuan dalam politik, sebagai upaya struktural untuk menghadapi marjinalisasi suara perempuan dalam pengambilan kebijakan.

Jurnal Jenkins dan Kim menunjukkan bagaimana gerakan seperti KWAU menghadapi tantangan ganda: dari sistem patriarkal yang sudah mengakar dan dari strategi politik modern yang sengaja memperkeruh hubungan antar gender demi kepentingan elektoral.

Terdapat teori feminisme radikal dan konstruktivisme relevan di sini, karena keduanya menekankan bagaimana kekuasaan politik dan konstruksi sosial membentuk (dan seringkali membatasi) posisi perempuan dalam masyarakat.

Studi ini menggunakan survei untuk mengukur sikap misoginis, termasuk devaluasi perempuan, persepsi bahwa perempuan manipulatif, dan ketidakpercayaan terhadap perempuan. Hasilnya menunjukkan bahwa sikap misoginis berkorelasi positif dengan dukungan terhadap Lee Jun-seok, mantan ketua PPP, namun tidak secara langsung memengaruhi pilihan suara dalam pemilihan presiden.

Penelitian ini menyoroti bahwa kemunculan backlash terhadap feminisme tidak unik bagi Korea Selatan, namun memiliki karakteristik khas yang dipengaruhi oleh budaya Konfusianisme, tekanan ekonomi, dan pergeseran demografi. Sentimen tersebut tercermin dalam retorika politik yang menjanjikan penghapusan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga serta mengabaikan isu-isu struktural seperti kesenjangan upah dan kekerasan berbasis gender. Artikel ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana misogini dapat dijadikan alat mobilisasi politik di negara demokrasi industri yang maju, sekaligus memperingatkan risiko yang ditimbulkan terhadap kemajuan gender di era saat ini.

Literatur ke Sembilan belas berjudul “A study on feminist scholarship and human rights activism against practices of gendered based violence: focused on Korean comfort women movement” yang ditulis oleh

Binur Balaubaeva, Sania Nuralieva, dan Syrym Parpiyev (2020) membahas isu "comfort women" Korea—perempuan yang dipaksa menjadi budak seksual oleh militer Jepang selama Perang Dunia II—dalam konteks aktivisme feminis dan hak asasi manusia. Penulis menekankan bahwa meskipun isu ini sempat terpendam selama sekitar 50 tahun memiliki pengaruh signifikan terhadap masyarakat Korea dan Asia lainnya di masa kini. Isu ini telah berkembang menjadi perdebatan universal yang melibatkan tidak hanya feminis Korea, tetapi juga cendekiawan feminis dan aktivis hak asasi manusia dari berbagai negara.

Korean Women's Associations United (KWAU) merupakan salah satu aktor penting dalam mengarusutamakan isu comfort women sebagai isu feminis dan bukan hanya isu nasionalistik.

Dalam konteks ini, jurnal ini sangat relevan untuk mendukung kajian mengenai peran Korean Women's Associations United (KWAU) karena:

- KWAU secara konsisten mengadvokasi keadilan bagi korban comfort women, termasuk mendesak pengakuan resmi dari pemerintah Jepang dan reparasi yang layak.
- KWAU menjadikan isu comfort women sebagai bukti kekerasan sistemik terhadap perempuan dalam struktur militer dan patriarkal, serta menghubungkannya dengan isu kekerasan berbasis gender kontemporer, seperti kekerasan rumah tangga dan kekerasan seksual di tempat kerja.
- Advokasi KWAU menekankan pentingnya memori kolektif dan narasi sejarah feminis sebagai bagian dari gerakan keadilan gender yang lebih luas.
- KWAU juga terlibat dalam kampanye internasional, termasuk bekerja sama dengan organisasi feminis global dan lembaga HAM untuk memperkuat suara korban di forum-forum dunia.

Penelitian ini menyoroti bahwa hierarki gender dan masyarakat patriarkal di Jepang dan Korea membatasi peluang bagi feminis dan aktivis hak asasi manusia dalam memperjuangkan isu comfort women. Selain itu, artikel ini mengkritisi Asian Women's Fund (AWF) yang dianggap sebagai

upaya Jepang untuk menghindari tanggung jawab hukum dan permintaan maaf resmi. Meskipun demikian, gerakan Chongshindae telah mencapai keberhasilan yang luar biasa dalam mengangkat isu *comfort women*, terutama dalam mendirikan monumen bersejarah dan menjadikan isu ini sebagai simbol politik melalui konteks nasional feminis.

Literatur kedua puluh berjudul “Gender mainstreaming and the institutionalization of the women's movement in South Korea” yang ditulis oleh Seung-kyung Kim dan Kyoung hee Kim (2011) membahas hubungan antara gerakan perempuan dan pemerintah Korea Selatan selama dua pemerintahan yang dianggap ramah terhadap perempuan, yaitu masa kepresidenan Kim Dae-jung (1998–2002) dan Roh Moo-hyun (2003–2007). Periode ini ditandai oleh meningkatnya aktivisme masyarakat sipil dan demokrasi partisipatif. Fokus utama tulisan ini adalah bagaimana gerakan perempuan berhasil menginstitutionalisasi agenda kesetaraan gender melalui kerja sama dengan negara, tetapi juga menghadapi dilema dalam mempertahankan semangat radikal dan otonominya. Penulis mengkaji peran lembaga seperti Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga (MOGEF), serta keterlibatan organisasi seperti Korean Women’s Associations United (KWAU) dalam mendorong reformasi kebijakan publik, termasuk isu-isu seperti kekerasan dalam rumah tangga, cuti melahirkan, diskriminasi di tempat kerja, dan partisipasi politik perempuan.

Artikel ini mengeksplorasi proses politik gender dan kompromi strategis yang perlu dilakukan antara gerakan perempuan dan kekuatan politik lainnya untuk memajukan agenda mereka. Penulis mempertanyakan apakah institutionalisasi gerakan perempuan secara otomatis mengarah pada demobilisasi dan de-radikalisasi, serta mengevaluasi dinamika antara gerakan perempuan dan pemerintah selama periode tersebut.

Terdapat peran historis dan strategis Korean Women’s Associations United (KWAU) dalam memperjuangkan kesetaraan gender di Korea Selatan. Beberapa poin kunci yang bisa diambil adalah:

- Korean Women's Associations United (KWAU) menjadi motor utama dalam mendorong terbentuknya kebijakan gender, termasuk pembentukan MOGEF dan undang-undang perlindungan perempuan.
- Korean Women's Associations United (KWAU) mengadopsi pendekatan dual strategy: menghadirkan tekanan dari luar melalui gerakan sosial, sembari berkolaborasi dari dalam melalui partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan.
- Advokasi feminis oleh Korean Women's Associations United (KWAU) dalam kerangka feminisme liberal dan konstruktivisme terlihat dalam upayanya mendorong reformasi hukum dan budaya institusional secara bersamaan.
- Korean Women's Associations United (KWAU) juga menjadi salah satu kekuatan utama dalam menyusun kerangka gender mainstreaming nasional, meskipun juga menghadapi kritik karena terlalu "bernegosiasi" dengan negara.

Studi pendahuluan di atas ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana gerakan perempuan dapat memanfaatkan peluang politik untuk mempengaruhi kebijakan negara, serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga keseimbangan antara kolaborasi dengan pemerintah dan mempertahankan otonomi gerakan.